

SKENARIO RISIKO POLITIK 2006: 'Gesekan Piston Spiral'

Servastius Pandur
KI Gendheng Pamungkas

Ketika George Soros, 75, spekulator pasar uang dunia datang ke Jakarta Januari 2006, ia menyampaikan tiga sinyal. Yakni 'rupiah is still likely to volatile', ekonomi Amerika Serikat (AS) bakal terpukul resesi tahun 2007, dan terorisme tidak bisa dilawan oleh perang. (Bernama, 7/1/2006) Apa makna tiga sinyal itu terhadap skenario risiko politik di NKRI?

Tiga bulan sebelum Soros, pengusaha AS asal Hongaria itu, datang ke Indonesia, pada September tahun 2005, angka rupiah/dollar menembus level Rp 10.000 per dollar AS. Soros mengaku, dirinya tidak lagi mendagangkan komoditi rupiah/dollar di pasar. Sementara saat rupiah sedikit limbung itu, Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, berkomentar. Bahwa gejolak rupiah itu tidak seperti level krisis keuangan pada zona rupiah seperti tahun 1997-1998.

Kata Lee Kuan Yew, level gejolak rupiah pada September 2005, hanya gejala psikologis pasar. Artinya, level psikologis rupiah tidak bakal merambat ke level sosial-politik rupiah/dollar. Seperti krisis rupiah tahun 1997-1998 memaksa Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden NKRI. Indonesia akhirnya meminta pinjaman dan

dana talangan dari IMF. (Bloomberg, September, 2005)

Sinyal risiko dari Soros bersisi makna ganda. Resesi ekonomi AS tahun 2007 bermakna salah satu ancaman '*global risk*'. Berikutnya, teror pasar akibat aksi-aksi terorisme belum dapat dipulihkan oleh 'polisi dunia', payung keamanan AS. (CNN, 9/1/2006). Salah satu zona tujuan pasar utama ekspor Indonesia selama ini adalah AS. Impor AS dari Indonesia untuk komoditi dagang pertanian mencapai 1,2 miliar dollar AS pada tahun 2003. Mata dagangan utamanya ialah karet, coklat, dan lain-lain. Aliran investasi asing (langsung) dari AS ke Indonesia mencapai 7,5 miliar dollar AS pada tahun 2002, turun dari 8,2 miliar dollar AS pada tahun 2001. Sektornya ialah pertambangan, manufaktur dan perbankan.

Di sinilah perlunya, pemetaan skenario risiko sosial-politik dari setiap pilihan kebijakan pemerintah pada semua *level*. Paparan berikut ini menguraikan skenario risiko politik tahun 2006.

ANGKA-ANGKA RISIKO

Memasuki tahun 2006, sekurang-ku-

rangnya ada 9 (sembilan) indeks risiko yang mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, psikokinetik politik di NKRI. *Pertama*, daya tahan tata sosial-ekonomi negara dan rakyat diuji oleh persebaran virus. Seperti virus flu burung H5N1, virus HIV/Aids, wabah polio, DBD, yang bisa meraupuhkan stamina kantong-kantong sosial-ekonomi rakyat yang terkena serangan virus dan wabah.

Akhirnya, daya tahan atau *survival* suatu tata masyarakat ekonomi politik, khususnya negara seperti NKRI, mengalami seleksi alam ketika penyebaran virus flu burung H5N1 memunculkan 'kecemasan global'. Memasuki pekan ke-3 tahun 2006, 14 orang tewas di Indonesia karena serangan virus H5N1. (AFP, 27/1/2006) Awal tahun ini di lima kecamatan Cianjur, Jawa Barat, sekitar 600 ribu unggas terancam serangan flu burung H5N1. Sekitar 326 ribu penduduk Kabupaten Banjar tinggal di daerah rawan longsor. (*Kompas*, 12/1/2006).

Total jumlah penderita Demam Berdarah (DBD) di RS Labuang Baji Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2005 mencapai 1.094 orang. Wabah penyakit Chikungunya menyerang 95 orang di Malang. Bencana longsor di Jember

dan Banjarnegara (Jawa Tengah) telah merenggut nyawa ratusan orang. Risiko riil yakni '*human lost*' dan '*property lost*'. Sekitar 990 tewas akibat DBD dengan jumlah kasus 73.200 di Indonesia tahun 2005.

Banyak pihak khawatir terhadap risiko serangan virus H5N1 melanda Asia Tenggara. Sejak tahun 2003, 80 orang telah tewas di Asia karena serangan virus H5N1. (AFP, 27/1/2006) ADB memperkirakan *level* kerugian bisa berkisar 99,2 miliar sampai 282,7 miliar dollar AS jika virus flu burung H5N1 benar-benar menyerang zona pasar Asia—khususnya Asia Tenggara dan RRC. Kerugian bisa dialami oleh sektor konsumsi, perdagangan dan investasi. Kerugian lain, seperti karyawan meninggal, berkisar 14,2 miliar dollar AS. Jika risiko ini terjadi, dampaknya lebih besar dari krisis keuangan 1997-1998 di Asia. Indonesia termasuk front depan dalam kampanye dan risiko serangan pandemik flu burung H5N1. Perlu dicatat, bahwa Indonesia adalah front depan dari upaya mencegah '*global threat*' virus flu burung H5N1. (*Global Politician*, 29/11/2005).

Kedua, tekanan terhadap tata sosial-ekonomi negara juga 'ditambah' oleh

lonjakan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan dua kali harga BBM tahun 2005 telah memicu nestapa sosial-ekonomi sebagian rakyat di Indonesia. Indeks nestapa sosial ekonomi rakyat bakal meningkat. Target inflasi tahunan bakal melampaui perkiraan Bank Indonesia (BI) jika pemerintah menaikkan harga TDL melebihi 30 persen. (Reuters, 24/1/2006).

Ketiga, bencana alam. Gempa selama dua menit sekitar 7,7 skala Richter (versi *Geological Survey AS*) telah memicu kepanikan warga di Ambon pada Jumat (27/1/2006). Gempa tektonik 4,8 pada skala Richter juga mengguncang Lampung (28/1/2006). Enam orang tewas akibat tanah longsor di Rembang, Sabtu (28/1/2006). Banjir menyebabkan lau-lintas Pantura macet total jelang akhir Januari 2006. (KCM, 28/1/2006). Tingginya curah hujan pada akhir Januari 2006 menyebabkan provinsi Jawa Tmur dan Jawa Tengah terancam banjir dan tanah longsor. Jadi, kita kini hidup di lingkungan sangat berisiko bencana alam.

Keempat, sekitar 43 orang asal Papua dilaporkan mencari suaka politik di Australia. (AAP, 28/1/2006). Isi sebuah dokumen perihal dukungan politik dan militer AS untuk Indonesia masuk ke

Timor-Timur tahun 1975/1976, mulai dibuka ke pers dan masyarakat dunia sejak 13 Desember 2005. Antara lain dokumen hasil kerja dari lembaga riset nirlaba, *National Security Archive*, di Washington, AS, setebal 4.500 halaman. Terungkap pula kekerasan selama 1976-1999 yang mengewaskan sekitar 100 ribu orang di Timor Timur. (Washington Post, 25/1/2006)

Kelima, laporan pers menyebutkan beberapa kantong kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar pada sejumlah wilayah selama tahun 2005-awal tahun 2006. Misalnya, di Yahukimo (Papua) beberapa waktu lalu, pers melaporkan anggota masyarakat meninggal karena kelaparan. Pemerintah pusat dan pemda memang telah berupaya untuk terus mengatasi dan mencegah risiko busung lapar, gizi buruk dan kelaparan di sejumlah daerah.

Keenam, kemampuan kerja Polri. Tahun 2001 jumlah personil Polri berkisar 242.118 personil, dengan komposisi, Pati 121, Pamen 4.812, Pama 42.567, Bintara 175.525 dan Tamtama 19.093. Perkiraan jumlah personil Polri tahun 2004 berjumlah 364.398. Jumlah ini tidak memadai dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, khususnya di daerah-daerah padat

penduduk. UU Polri tahun 2001 memisahkan Polri dari TNI. Polri tidak mudah mencegah dan mengatasi berbagai kekerasan sektarian, kerusuhan berdarah, perkosaan, pelecehan, dan tindakan kriminal lainnya di seluruh Indonesia.

Ketujuh, kontrol perbatasan. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17 ribu sepanjang 3.200 mil dari timur ke Barat di sepanjang khatulistiwa, antara Asia dan Australia. Sebagian besar dari wilayah Indonesia dikitari oleh laut dan lautan. Indonesia sulit mengawasi setiap jengkal dari perbatasannya, sehingga terbuka bagi pencurian ikan dari laut Indonesia, penyelundupan manusia, barang dan jasa. Sementara perampok sering merajalela khususnya di kawasan Selat Malaka. Dari sekitar 325 perampokan laut yang terjadi di dunia pada tahun 2004, sekitar 93 terjadi di perairan Indonesia.

Kedelapan, kondisi perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Menurut laporan organisasi kesehatan dunia (WHO), pada tahun 2001, anggaran kesehatan Indonesia berkisar 2,4 persen dari GDP—angka paling rendah dibanding Thailand, 3,7 persen dari GDP, dan Filipina 3,1 persen dari GDP. Akses ke jasa layanan kesehatan sa-

ngat bergantung pada kekayaan seseorang. Sistem kesehatan dihadapkan pada lemahnya investasi bidang kesehatan. Tingkat kematian bayi sekitar 37 pada 1.000 orang.

Kesembilan, program dan infrastruktur sosial rapuh. Fasilitas pendidikan di daerah pedesaan terbatas, khususnya untuk anak-anak usia 6-15 tahun. Menurut laporan UNESCO tahun 2001, sekitar 98 persen anak-anak Indonesia menamatkan SD. Sekitar 4,6 saluran telepon untuk 100 penduduk pada tahun 2004. Bandingkan di Thailand sekitar 12 lines dan 18 lines di Malaysia. Saluran untuk sektor bisnis sekitar 19,8 persen, rumah tangga 78,8 persen, dan sisanya pemerintah.

SKENARIO RISIKO POLITIK: GESEKAN PISTON SPIRAL

Sadar atau tidak, saat ini kita hidup di lingkungan rawan bencana dan risiko. Selain itu, dari laporan media dan tayangan tv, kita menyaksikan gerakan-gerakan tenaga kerja dan PHK di sejumlah zona. Kata pakar psikokinetik, nafsu dan libido manusia dapat menggerakkan politik. Faktor libido politik bisa saja muncul berupa amuk baik *level* orang per orang maupun skop

nasional. Skenario risiko seperti ini sangat terbuka untuk kira-kira tiga bulan ke depan di NKRI—jika tidak diantisipasi.

Sedangkan pada *level* alam, sangat jelas alam tidak bersahabat. Seperti banjir bandang di sejumlah wilayah, gempa, tanah longsor telah menelan korban ratusan jiwa. Artinya, sisi alam yang seharusnya senyawa seperti tanah dengan tanah, dari alam kini seperti tergoncang dan goyah. Ini salah satu dampak dari pembabatan dan perusakan hutan yang diperkirakan 1,5 juta hektar per tahun sejak tahun 1999.

Secara makro, titik-titik keseimbangan alam sulit tercapai. Sebab alam langsung berhadapan dengan perilaku manusia yang rakus (*greedy*) atau tamak. Untuk tiga bulan ke depan, dampaknya secara sosial-politik bisa saja terasa pada skala daerah, seperti kabupaten, daerah, kota madya, dan mungkin provinsi.

Perilaku tamak dan rakus manusia mampu mengkerdilkan akal-sehat. Akibatnya, kian parah yakni lahirnya psikopat politik. Ekpresi politiknya ke depan publik kian transparan karena demokrasi memungkinkan hal itu. Tapi, kelemahannya, tidak satunya pikiran,

ucapan, dan tindakan para aktor politik. Kondisi-kondisi semacam ini sangat telanjang di depan mata rakyat. Padahal, retorika dan popularitas belum melahirkan pemulihan krisis dan kemajuan.

Sebagai contoh, rakyat bisa saja menagih janji-janji kampanye pemilu lalu dari para elite politik. Bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan naik 5 – 7 persen per tahun, kepastian hukum lebih ditingkatkan, menyelesaikan konflik-konflik pada sejumlah daerah, pengangguran akan berkurang dari kira-kira 10,1 persen pada akhir 2004, menjadi sekitar 6 persen, jumlah penduduk miskin berkurang hingga hanya 19 juta jiwa, dan pemerintah akan lebih bertanggungjawab pada dan memperhatikan seluruh rakyat Indonesia. (AP, Oktober, 2004)

Jika tidak terartesisikan, akumulasi kejelehan dan kemarahan publik yang terpendam, dapat menggumpal, menyatu, dan membentur alam dan lingkungannya. Maka diperlukan wadah yang mampu menyalurkan, menampung, mengartesisikan nurani rakyat. Dari hari ke hari, kepercayaan rakyat dan pasar bisa saja terkikis. Sebab janji-janji melalui kampanye politik masa lalu belum tercapai dan belum diras-

sakan oleh rakyat.

Contoh kasus ialah risiko rakyat tidak percaya lagi pada wakil rakyat. Bahwa DPR menyetujui impor beras itu sekilas merupakan faktor alam atau seleksi alam. Peristiwa itu seakan-akan di luar akal sehat politik atau disadari oleh DPR. Dari sudut pandang psikopat politik, kejadian tersebut—pro dan kontra impor beras—bisa merupakan proses tidak sadar dari para pelakunya ketika melakukan tulisan dan pilihan di kertas kerja.

Bentuk-bentuk psikopat politik yang berisiko ialah dusta politik dan janji-janji politik yang tidak kunjung dipenuhi oleh para elite. Kebuntuan pun bisa terjadi di lapisan rakyat. Salah satu contoh dari model kebuntuan itu yakni kampanye 'hemat listrik'. Kampanye ini bisa saja tidak berjalan sampai ke *level* rakyat, jika rakyat tidak menyaksikan hal serupa pada *level* elite, seperti perusahaan raksasa dan lain-lain. Tanpa disadari, hal-hal seperti ini memicu kebuntuan dan kemacetan aliran politik dari bawah ke atas atau sebaliknya.

Akumulasi dari kebuntuan dan kemacetan aliran politik bisa memicu lahirnya kondisi politik berisiko yakni gesekan dan gerakan '*piston spiral*'.

Yaitu suatu kondisi sosial-politik yang bercirikan bahwa semua struktur politik tidak menjalankan fungsinya. Artikulasi macet. Agregasi macet. Kemacetan itu ada pada semua *level*. Maka akan timbul pola gesekan dari bawah ke tengah, terus ke lapisan atas, dan kemudian gesekan turun ke lapis bawah.

Gesekan-gesekan itu secara alamiah akan menimbulkan aus pada tata sosial-politik dan ekonomi. Dari sudut fisika politik, untuk NKRI itu selama ini, komoditi BBM termasuk kategori dan simbol dari pelumas-pelumas gerakan dari gesekan-gesekan kecil sampai ke *level* gesekan-gesekan besar. Dari *level* bawah sampai *level* atas. Ausnya tata sosial, ekonomi, dan politik suatu negara bisa dipercepat oleh fluktuasi harga BBM. Fluktuasi harga komoditi BBM selama ini selalu menekan dan memukul ke sejumlah titik dari tata sosial-ekonomi rakyat.

Artinya, khusus tahun 2006 ini, pemerintah tentu berhati-hati menentukan harga BBM. Jika tidak hati-hati, pelumas BBM bisa mempercepat gerakan dan gesekan '*piston spiral*' dan memudahkan ausnya tata sosial-ekonomi. Akibat riil dari kondisi aus pada

rakyat tidak lain dari kelaparan. Jika tidak diantisipasi efek aus akibat gesekan dan gerakan *piston spiral* itu akan semakin lebar dan luas skalanya. Kebutuhan *libido* arus bawah akhirnya harus dipenuhi, misalnya, pasokan beras impor.

Secara teoretis, sebuah piston umumnya berkaitan dengan (1) busi atau steker, (2) silinder, (3) perubahan volume, (4) desakan atau dorongan kekuatan (*force/power*) pada cairan dalam silindernya. Dalam hal ini, secara sosial-politik, gesekan naik dan turun dari *piston spiral* bisa dipercepat oleh lonjakan harga barang dan jasa lainnya. Pergerakan harga adalah perubahan-perubahan volumenya yang dapat mempengaruhi atau mendesak suatu kekuatan. Artinya, dari sudut telaah piston spiral sosial-politik, pemerintah mestinya hati-hati dalam menetapkan tarif-tarif. Khususnya tarif-tarif yang langsung memicu nestapa sosial-ekonomi rakyat, seperti BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Misalnya, jika kenaikan TDL ditetapkan pada *level* kelas usaha dan kelas pengguna 450-900 watt, maka hasilnya justeru dapat memicu risiko. Jika disimbolkan angkanya ialah 6 dan 9—yakni gonjang-ganjing dan oleng.

SKENARIO RISIKO 'POLITICAL STROKE'

Macetnya saluran-saluran klasik politik bisa memicu risiko fase kedua yakni 'political stroke'. Seperti halnya sakit stroke selalu menyerang bagian atas tubuh manusia, maka 'political stroke' merupakan suatu istilah sederhana untuk memetakan perkiraan risiko politik pada elit. Yaitu bahwa elite tidak hanya tidak dipercaya oleh para konstituennya, tetapi juga kebuntuan-kebuntuan dari libido yang tidak tersalur dapat merusak kesehatan tubuh manusia.

Banyak orang menyebut istilah 'post power syndrome' yang dapat memicu tubuh seseorang tidak sehat. Karena ada beban psikologis. Ada sumbatan libido tidak terartesisikan. Akibatnya, pembuluh darah bisa pecah yang disebabkan oleh sebab-akibat tekanan dari arus bawah. Sementara tenaga di pusat sangat dahsyat, seperti angin puting beliung. Sistem atau saluran angin, air, darah, dan sari makanan untuk sementara bisa macet. Begitu pula bisa terjadi dalam tata sosial-politik. Benih-benih seperti ini selalu melahirkan 'revolusi istana' di sejumlah negara.

Apa variabelnya? Yakni (1) psikopat

politik, (2) libido atau tekanan arus bawah yang tersumbat, (3) tidak tersedianya keseimbangan alam. Akibatnya, untuk sementara sejumlah fungsi di sekitar elit bisa saja lumpuh. Tentu saja, kondisi ini bukan kita inginkan terjadi di NKRI. Maka dibutuhkan opsi taktis untuk meredam gesekan dan gerakan piston-spiral politik dan ancaman 'political stroke' pada level elite politik.

Tekanan arus bawah bisa saja menggumpal menjadi keadaan dan kekuatan hipnotis sosial-politik. Hipnosis tidak lain dari keadaan akibat komunikasi saling-pengaruh tanpa sadar. Kurang lebih seperti keadaan-keadaan dan zona-zona kendali perilaku seseorang menjadi 'split off' dari keadaan normal manusia-manusia waras dan kewajaran. Sekat-sekat kewajaran limbung. Dalam keadaan semacam ini, hipnosis seharusnya dikendalikan oleh kesadaran atau akal sehat seseorang. Tetapi hal ini tidak terjadi untuk keadaan hipnosis. Akibatnya, perilaku orang menjadi serba otomatis dan reflektif saja. Tidak ada roh, tidak ada nilai, tanpa sensor ideologi secara politik. (Weitzenhoffer, *Hypnotism: An Objective Study in Suggestability*. New York, Wiley, 1953.)

Tentu saja, kondisi hipnosis politik dari

para elite bisa memicu risiko sangat serius. Sebab jika ini sedang terjadi, artinya elite politik yang berada pada saluran-saluran dan struktur klasik jaringan puncak komunikasi politik tidak lagi dapat merekam, mewadahi, menyalurkan, dan memenuhi sinyal-sinyal tele-psiko-kinetik dari arus bawah politik. Sinyal-sinyal itu (kebutuhan, tuntutan, protes, desakan, oposisi, harapan, dan lain-lain) belum bisa tertangkap. Sebab alam sadar elite luput memperhatikannya.

Sejauh ini, tampaknya elite sulit merekam sinyal-sinyal arus bawah. Kalau skenario risiko ini luput diredam, maka gesekan-gesekan *piston spiral* tadi dapat kian mendesak dan menimbulkan *vertigo politik*. Misalnya, dinamika politik seakan tidak normal. Partai yang wakilnya memegang jabatan di eksekutif membangun 'oposisi' terhadap kebijakan pemerintah seperti impor beras.

Kondisi sosial-politik yang 'tidak normal' seperti tersebut di atas terjadi karena ekuilibrium tidak tercapai. Akibat gesekan piston spiral yang dari hari ke hari semakin cepat. Perubahan pun terasa begitu cepat dari waktu ke waktu. Kewaspadaan kian sulit. Sorotan mata menjadi silau. Karena

perubahan warna pun dapat bergerak sangat cepat, dari merah ke hijau, kemudian menjadi biru ke kuning dan akhirnya hitam—gelap. Sebab ketajaman akal sehat dan nurani menjadi kabur dan beku. Kabinet pelangi akhirnya dapat menghasilkan peman-tulan terbalik.

Risiko vertigo politik tentu saja kian diperparah jika simbol, sinyal dari arus bawah belum diterjemahkan dan ditanggapi oleh elite-elite politik melalui realisasi janji-janji politiknya selama masa kampanye tahun 2004. Dalam kondisi *vertigo politik*, semua juru bicara, mediator, komunikator, lobi dan penghubung aliran DPR-Pemerintah-Rakyat dan pasar, bisa menjadi macet dan buntu.

Sinyal alam dan saluran-saluran klasik ekonomi-politik sekilas memperlihatkan keadaan kurang ekuilibrium. Misalnya, dulu Vietnam belajar bercocok-tanam padi pada kita di Indonesia. Sekarang kita mengimpor beras dari Vietnam. Sejumlah laporan selama ini menyebutkan bahwa produksi LNG di Aceh, merupakan terbesar di jagad raya ini. Begitu pula, penambahan emas oleh Free Port di Papua, diceritakan sebagai nomor dua terbesar di dunia. Tetapi, masih ada busung

lapar, gizi buruk, korban wabah DBD, polio, dan lain-lain? Keadaan seperti tersebut di atas bisa saja memicu kondisi limbung akibat gesekan-gesekan piston spiral, psikopat politik, dan tekanan arus bawah.

ZERO OPTION

Psikopat politik, tekanan arus bawah, macetnya saluran-saluran klasik sosial-politik, ketidakseimbangan atau bencana-bencana alam, bisa saja mendesak kita ke *level*: *zero option* atau tidak ada pilihan lain. Dari pers awal tahun ini, ada perkiraan bahwa inflasi tahunan berkisar 17,11 persen dari 18,38 persen pada November 2005. *Level* rupiah berkisar Rp 9000-an per dollar AS.

Angka-angka ekonomi, sinyal dan indeks risiko akhir-akhir ini, diharapkan diperhatikan oleh Pemerintah jika merilis kebijakan ekonomi baru Paket Kebijakan Ekonomi tahun 2006, seperti pengembangan sektor pertambangan dan CPO, lapangan kerja, serta penyesuaian sekitar tarif seperti 8 ribu jenis tarif.

Indonesia tidak membutuhkan arogansi komunikasi. Tetapi, format komunikasi yang lebih sahaja, kerakyatan, dan

bertujuan memulihkan keadaan rakyat dan negara dari krisis. Risiko politik akan kian nyata jika format komunikasi seperti ini pun tenggelam oleh arogansi saluran klasik politik. Apalagi, sosok tampil ke rakyat bukan sebagai negarawan, pembela rakyat, tetapi sebagai pedagang yang siap tawar-menawar, jual-beli, atau menggaungkan apa saja.

Misalnya, kita bisa tergoda menjual demokrasi—"Kedaulatan adalah di tangan rakyat..." bunyi pasal 1 ayat 2 dari UUD 1945—dengan aliran investasi asing. Padahal, nyata-nyata sejak diloloskan UU Investasi tahun 1967, belum terlihat bahwa aliran investasi asing melahirkan negara dan rakyat sejahtera, lingkungan hidup yang lestari, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Isu seperti ini layak dibahas dalam rangka lahirnya UU Investasi baru nanti.

Angka-angka sosial-ekonomi 2006 belum melahirkan harapan mencegah piston spiral dan vertigo politik. Misalnya, sekitar 990 tewas akibat DBD dengan jumlah kasus 73.200 di Indonesia pada tahun 2005. Defisit APBN 2006 diperkirakan lebih besar dari defisit APBN tahun 2005. Karena kenaikan anggaran pemerintah untuk proyek

jalan dan tenaga listrik. Besaran defisit berkisar 0,9 sampai 1,1 persen dari GDP. Angka ini lebih besar dari perkiraan pemerintah sekitar 0,7 persen. Menurut rencana, pemerintah menyelesaikan proyek-proyek senilai Rp 17,9 triliun dari APBN 2005 seperti pembangunan jalan raya, klinik medis, sistem irigasi, untuk triwulan pertama tahun 2006. Defisit APBN 2005 berkisar 0,5 persen GDP atau sekitar Rp 13,97 triliun. (Bloomberg, 11/1/2006)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum menggembirakan, berkisar 5,34 persen pada triwulan ketiga tahun 2005, atau turun dari pertumbuhan ekonomi sebesar 6,66 persen pada triwulan keempat tahun 2004. (Reuters, 11/1/2006). Padahal, target pemerintah, pertumbuhan ekonomi bulan Desember berkisar 6,2 persen.

Pemerintah tampaknya mesti ekstra hati-hati menciptakan utang baru. Betul ada upaya pemerintah untuk *meres-kedul* bilateral utang Indonesia dengan Jepang yang berkisar 40 persen dari total utang luar negeri Indonesia. Selama ini, upaya reskedul utang luar negeri Indonesia umumnya dilaksanakan secara multilateral. (Asia Pulse, 10/1/2006). Politik utang mestinya tidak sampai mempercepat gesekan

piston spiral dan *vertigo politik*.

Gejolak rupiah mestinya lebih dari sekedar gejala psikologis pasar. Tetapi, jika subsidi diteruskan, defisit APBN tidak terbendung, rupiah akan terus merosot, dan tingkat suku bunga bakal naik. Maka subsidi perlu dipotong dan diganti oleh paket BLT atau SLT. Sehingga lonjakan harga minyak di pasar dunia tidak memaksa Indonesia membeli banyak dollar AS untuk membeli minyak impor. Apa pilihan kebijakan itu berisiko? Menurut Lee Kuan Yew, "Bergantung seberapa besar memotong subsidi-subsidi dan apakah dukungan BLT/SLT) ke rakyat miskin secara ekonomis berarti dan tidak merupakan bolong besar baru pada APBN, saya kira ekonomi Indonesia akan stabil."

Dari semua paparan tersebut di atas, adalah satu skenario risiko politik tahun 2006 ialah gesekan-gesekan *piston spiral*. Polanya bisa saja berbeda dari gesekan politik tahun 1997-1998 yang bergerak dan bergesek dari atas ke bawah. Jika terjadi *vertigo politik* maka episentrumnya ialah kepala atau saluran elite politik. Artinya, tidak terjadi gesekan-gesekan horisontal. Jika atas goyah atau limbung, arus bawah biasa saja. Itulah ciri khas dari *piston spiral* dan *vertigo politik*. □